

RESEARCH ARTICLE

Systematic Literature Review: Hambatan dan Peluang Penerapan SAK EMKM Di Indonesia

Tiara Abdurahman^{1*}, Fityan Halid², Mattoasi³, Hartati Tuli⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Pascasarjana, Program Studi Sains Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.

Email: faradiladesti@gmail.com^{1*}, fityanhalid@gmail.com², mattoasi@ung.ac.id³, hartati@ung.ac.id⁴

Histori Artikel:

Dikirim 14 Agustus 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 Januari 2026; Diterima 20 Februari 2026; Diterbitkan 1 April 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Abdurahman, T., Halid, F., Mattoasi, M., & Tuli, H. (2026). Systematic Literature Review: Hambatan dan Peluang Penerapan SAK EMKM Di Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(2), 1415-1422. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i2.6223>.

Abstrak

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) diterbitkan untuk membantu UMKM menyusun laporan keuangan yang lebih sederhana tetap sesuai kaidah akuntansi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar ini masih belum optimal di berbagai wilayah dan sektor usaha. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan hambatan serta peluang penerapan SAK EMKM di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan penerapan SAK EMKM bersumber dari tiga lapisan utama, yaitu kapasitas internal, struktural-sosial, dan institusional. Meskipun demikian, penelitian juga mengidentifikasi peluang penguatan melalui peningkatan kapasitas, digitalisasi pembukuan, kolaborasi lintas lembaga, serta pemberian insentif eksternal seperti persyaratan pembiayaan berbasis laporan keuangan standar. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemetaan komprehensif hambatan dan peluang penerapan SAK EMKM, yang dapat menjadi dasar bagi perancang kebijakan, akademisi, dan pendamping UMKM dalam merumuskan strategi implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: SAK EMKM; Pelaporan Keuangan; Hambatan Implementasi.

Abstract

The Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) were issued to assist MSMEs in preparing simpler financial statements while remaining compliant with accounting principles. However, numerous studies indicate that the implementation of SAK EMKM remains suboptimal across regions and business sectors in Indonesia. This study aims to map the barriers and opportunities for SAK EMKM implementation using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The findings reveal that implementation barriers originate from three main layers: internal capacity constraints, socio-structural factors, and institutional limitations. Despite these challenges, the study identifies several opportunities for strengthening implementation, including capacity-building initiatives, bookkeeping digitalization, cross-institutional collaboration, and external incentives such as financing requirements based on standardized financial reports. This study contributes a comprehensive mapping of barriers and opportunities, providing a valuable reference for policymakers, academics, and MSME facilitators in formulating more effective and sustainable SAK EMKM implementation strategies.

Keyword: SAK EMKM; Financial Statement; Implementation Barriers.

1. Pendahuluan

Di Indonesia, unit usaha yang memiliki potensi besar untuk berkembang ialah UMKM, yang merupakan elemen krusial bagi perekonomian Indonesia karena berperan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Namun, pengelolaan keuangan UMKM menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang andal dan sesuai standar, karena pelaku UMKM umumnya belum memahami prinsip dasar akuntansi serta penerapan SAK EMKM dalam pelaporan keuangan formal (Luchindawati *et al.*, 2021; Nabila & Khoiriawati, 2023; Tuli & Mahmud, 2024). Praktik pencatatan keuangan sering kali hanya mencakup arus kas masuk dan keluar tanpa dilengkapi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, maupun catatan atas laporan keuangan (Cahyaningtias *et al.*, 2022; Ekasari *et al.*, 2021). Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan UMKM tetap sederhana dan tidak memenuhi struktur minimum SAK EMKM, sehingga kurang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan atau akses pembiayaan (Imawan *et al.*, 2023; Utari *et al.*, 2022). Sejumlah penelitian kasus menunjukkan bahwa standar ini berpotensi membantu UMKM menghasilkan laporan keuangan yang lebih terstruktur, meskipun implementasinya di berbagai konteks usaha masih belum optimal (Ekasari *et al.*, 2021; Fitriana, 2022; Luchindawati *et al.*, 2021; Utari *et al.*, 2022). Temuan empiris secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih mengalami kesulitan menerapkan SAK EMKM secara menyeluruh. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha belum memahami struktur dan komponen laporan keuangan sesuai SAK EMKM, sehingga pencatatan yang dilakukan tetap bersifat sederhana dan belum menggambarkan posisi keuangan maupun kinerja usaha secara memadai (Cahyaningtias *et al.*, 2022; Emba *et al.*, 2025; Mattoasi, 2023; Suwondo, 2021). Pola serupa terlihat pada berbagai sektor seperti perikanan, laundry, makanan, dan kerajinan, di mana pencatatan keuangan sering bercampur dengan keuangan pribadi pemilik dan tidak didukung sistem pembukuan yang terdokumentasi dengan baik (Cahyaningtias *et al.*, 2022; Hamongsina *et al.*, 2022; Imawan *et al.*, 2023; Saputri *et al.*, 2025). Selain hambatan kapasitas internal, implementasi SAK EMKM turut dipengaruhi faktor struktural dan kelembagaan. Pendampingan akuntansi kerap bersifat sementara sehingga tidak menghasilkan perubahan praktik yang berkelanjutan (Hamongsina *et al.*, 2022; Kurni *et al.*, 2023). Relasi UMKM dengan lembaga keuangan formal juga masih terbatas, mengurangi insentif untuk menyusun laporan keuangan standar (Ningsi *et al.*, 2024; Rabianti & Heniwati, 2024). Di samping itu, keterbatasan modal, prioritas dana operasional, serta ketiadaan regulasi yang secara tegas mewajibkan pelaporan keuangan berbasis SAK EMKM turut memperlambat adopsi standar tersebut (Feriyanto & Nuryani, 2024; Krisdiyawati & Maulidah, 2023). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai hambatan yang dihadapi UMKM dalam menerapkan SAK EMKM; dan (2) menggali peluang serta strategi penguatan yang dapat mendorong implementasi SAK EMKM secara lebih luas dan berkelanjutan. Melalui pemetaan sistematis atas hambatan dan peluang tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan mengenai aspek yang memengaruhi penerapan standar akuntansi pada UMKM, sekaligus kontribusi praktis bagi perancang kebijakan, pendamping UMKM, dan pelaku usaha dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan UMKM di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

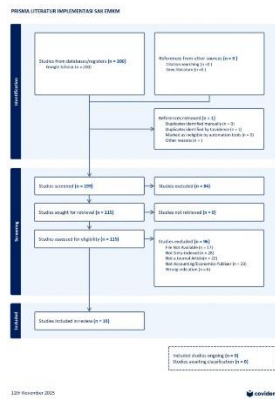
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian terkait dengan perkembangan UMKM. Menurut Luchindawati *et al.* (2021), salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam penerapan SAK EMKM adalah rendahnya literasi akuntansi di kalangan pelaku usaha. Hal ini diperburuk dengan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya laporan keuangan yang sesuai standar. Sebagai contoh, banyak pelaku UMKM yang masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana, hanya

RESEARCH ARTICLE

mencatat arus kas tanpa menyusun laporan keuangan yang komprehensif seperti laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi (Cahyaningtias *et al.*, 2022; Ekasari *et al.*, 2021). Keadaan ini menghambat kemampuan UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan serta membuat keputusan yang berbasis data keuangan yang tepat (Imawan *et al.*, 2023; Utari *et al.*, 2022). Selain itu, hambatan struktural-sosial seperti rendahnya hubungan UMKM dengan lembaga keuangan formal turut mempengaruhi implementasi SAK EMKM (Rabianti & Heniwati, 2024). Banyak pelaku UMKM yang tidak melihat urgensi untuk menyusun laporan keuangan yang standar karena tidak memiliki akses ke pembiayaan atau tidak pernah terlibat dalam transaksi dengan lembaga keuangan. Pandangan sosial yang melihat pencatatan keuangan sebagai aktivitas yang tidak bermanfaat bagi usaha mereka semakin memperburuk situasi ini (Feriyanto & Nuryani, 2024). Di sisi lain, penelitian oleh Hamongsina *et al.* (2022) dan Kurni *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa keberadaan pendampingan yang terbatas serta kurangnya SDM akuntansi berpengaruh besar terhadap kesulitan UMKM dalam menerapkan SAK EMKM secara efektif. Namun demikian, penelitian juga mengidentifikasi berbagai peluang yang dapat memperkuat implementasi SAK EMKM di Indonesia. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan akuntansi yang berbasis pada kasus-kasus nyata UMKM (Fitriana, 2022). Selain itu, digitalisasi pembukuan yang memanfaatkan aplikasi berbasis SAK EMKM juga menjadi salah satu strategi yang dapat mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan laporan keuangan, sehingga mengurangi persepsi bahwa penerapan SAK EMKM itu rumit (Cahyaningtias *et al.*, 2022; Imawan *et al.*, 2023). Kolaborasi antara pemerintah, bank, dan lembaga lainnya untuk memberikan insentif berupa akses pembiayaan berbasis laporan keuangan standar juga diidentifikasi sebagai peluang untuk mempercepat adopsi SAK EMKM (Hamongsina *et al.*, 2022; Rabianti & Heniwati, 2024). Oleh karena itu, penerapan SAK EMKM memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga pada peningkatan ekosistem yang mendukung.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini berbasis pada (SLR), yang didefinisikan sebagai metode komprehensif untuk mengidentifikasi, melakukan asesmen, dan menginterpretasikan secara menyeluruh seluruh hasil riset terkait topik penelitian guna memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian (Research Question) yang diajukan (Kitchenham & Charters, 2007). Pengumpulan literatur dilakukan menggunakan aplikasi *Publish or Perish* dengan kata kunci "Penerapan SAK EMKM" dan "Implementasi SAK EMKM" pada Google Scholar sehingga diperoleh sekitar 200 artikel awal periode 2021-2025. Artikel-artikel tersebut kemudian diseleksi menggunakan Covidence melalui tahap penyaringan judul, abstrak, dan full-text. Selain itu, peneliti turut memasukkan artikel yang terindeks SINTA sebagai bagian dari kriteria kelayakan. Proses seleksi ini menghasilkan 19 artikel yang digunakan sebagai bahan tinjauan literatur dalam penelitian ini.



Gambar 1. Prisma Literatur Implementasi SAK EMKM

4. Hasil dan Pembahasan

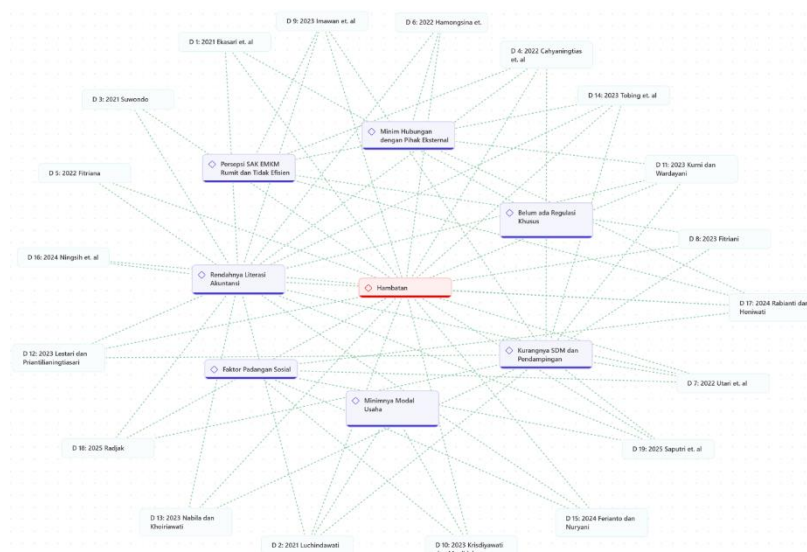
4.1 Hasil

4.1.1 Gambaran Umum Penerapan SAK EMKM di Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tahun 2016 dan pemberlakuannya sejak 1 Januari 2018, ini sebagai bentuk dukungan agar pelaku UMKM mampu menyusun laporan keuangan secara lebih akurat tanpa harus menghadapi kompleksitas standar akuntansi yang lebih tinggi. Namun demikian, meskipun jumlah dan perkembangan UMKM terus meningkat, pelaksanaannya di lapangan tetap menghadapi berbagai kendala yang membuat penerapan SAK EMKM belum sepenuhnya optimal. (Nabila & Khoiriawati, 2023; Tobing *et al.*, 2023). Rendahnya literasi pemahaman akuntansi menjadi salah satu kendala utama yang secara konsisten muncul dalam penerapan SAK EMKM di berbagai wilayah Indonesia. Pelaku usaha umumnya hanya melakukan pencatatan sederhana dimana sebatas pemasukan dan pengeluaran. Pelaku usaha belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai komponen wajib seperti laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

4.1.2 Hambatan Penerapan SAK EMKM di Indonesia

Berdasarkan hasil sintesis dari beberapa literature terkait (2021-2025), tantangan utama penerapan SAK EMKM di interpretasikan pada gambar circular yang diolah dengan Atlas.ti. Hasil menunjukkan bahwa hambatan penerapan SAK EMKM terutama dipengaruhi oleh rendahnya literasi akuntansi yang dialami seluruh UMKM (seluruh paper), diperkuat oleh kurangnya SDM dan pendampingan (11 paper), serta pandangan sosial bahwa pencatatan tidak memberi manfaat langsung bagi usaha (5 paper). Persepsi bahwa SAK EMKM rumit dan tidak efisien (5 paper), minimnya hubungan dengan pihak eksternal seperti bank (3 Paper), keterbatasan modal (2 Paper), dan ketiadaan regulasi wajib (1 Paper) turut membuat UMKM tidak memiliki insentif kuat untuk menerapkan standar akuntansi. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan bersifat saling terkait dan membentuk lingkaran yang mempertahankan praktik pembukuan sederhana dan menghambat penerapan SAK EMKM secara luas di Indonesia. Dari hasil pemetaan terlihat bahwa hambatan dalam penerapan SAK EMKM di Indonesia terbagi atas hambatan kapasitas internal, structural dan sosial, serta institusional. Dimana titik akar permasalahan yang memperlambat adopsi penerapan standar akuntansi yaitu rendahnya literasi akuntansi pada setiap pelaku UMKM.



Gambar 2. Circular Faktor Hambatan Penerapan SAK EMKM di Indonesia

RESEARCH ARTICLE

4.1.3 Peluang Penerapan dan Penguatan SAK EMKM di Indonesia

Hambatan penerapan SAK EMKM di Indonesia yang akan mendorong peluang dan penguatan adopsi standar pada para pelaku usaha UMKM di Indonesia. Adapun peluang penerapan SAK EMKM di Indonesia melalui strategi sebagai berikut:

Tabel 1. Peluang Penerapan dan Penguatan SAK EMKM

Hambatan Utama	Peluang Penerapan	Strategi Penguat Implementasi
Rendahnya literasi akuntansi	Kebutuhan peningkatan pemahaman akuntansi menjadi titik masuk untuk memperkenalkan SAK EMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan akuntansi praktis berbasis kasus UMKM • Penyederhanaan Panduan SAK EMKM • Integrasi SAK EMKM dalam kurikulum pelatihan
Kurangnya SDM dan pendampingan	Pendampingan berkelanjutan dapat meningkatkan praktik pencatatan dan penggunaan standar	<ul style="list-style-type: none"> • Program mentoring UMKM oleh kampus/ asosiasi • Relawan akuntansi desa/kecamatan
Persepsi SAK EMKM rumit dan tidak efisien	Digitalisasi dapat menyederhanakan proses pencatatan dan memperbaiki persepsi	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi pembukuan berbasis SAK EMKM • Pelatihan penggunaan aplikasi pencatatan sederhana
Minimnya hubungan dengan pihak eksternal	Interaksi lebih kuar dengan lembaga keuangan dapat menciptakan insentif untuk menerapkan SAK EMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan laporan keuangan SAK EMKM sebagai syarat akses KUR • Kolaborasi bank, dinas UMKM dan koperasi untuk sosialisasi
Keterbatasan modal	Laporan berstandar SAK EMKM dapat membantu UMKM memperoleh pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas kredit prioritas bagi UMKM dengan laporan sesuai standar • Pendampingan penyusunan proposal usaha dan laporan
Ketiadaan regulasi wajib	Ruang untuk membentuk dukungan kebijakan lokal tanpa membebani UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptkan regulasi yang mendorong, bukan memaksa • Standarisasi pelaporan UMKM dalam administrasi desa/daerah

4.2 Pembahasan

Penerapan SAK EMKM di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang saling terkait. Hambatan utama dimulai dari kapasitas internal UMKM, khususnya rendahnya literasi akuntansi. Ketika pelaku UMKM tidak memahami manfaat dan fungsi laporan keuangan, mereka cenderung menganggap SAK EMKM tidak relevan dengan usaha mereka, menganggapnya rumit dan tidak efisien (Luchindawati *et al.*, 2021; Suwondo, 2021). Pandangan ini semakin diperkuat dengan praktik pencatatan keuangan yang bersifat sederhana, hanya mencatat arus kas masuk dan keluar tanpa laporan posisi keuangan dan laba rugi (Feriyanto & Nuryani, 2024; Saputri *et al.*, 2025). Minimnya pendampingan dan keterbatasan SDM akuntansi juga memperburuk kondisi ini, menghambat perubahan praktik yang berkelanjutan dan memaksa UMKM kembali pada cara pembukuan yang sederhana tanpa melihat urgensi untuk mengikuti standar akuntansi (Hamongsina *et al.*, 2022; Kurni *et al.*, 2023). Selain itu, hambatan struktural-sosial juga muncul dari minimnya hubungan UMKM dengan lembaga eksternal, khususnya bank dan lembaga keuangan formal. Ketika UMKM tidak memerlukan dokumen keuangan formal untuk memenuhi

RESEARCH ARTICLE

persyaratan kredit, mereka cenderung mengabaikan pentingnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar (Rabianti & Heniwati, 2024). Hal ini menyebabkan UMKM terjebak dalam praktik pembukuan sederhana tanpa merasakan manfaat dari laporan yang lebih terstruktur. Rendahnya keterhubungan dengan lembaga eksternal juga menghalangi UMKM untuk mendapatkan edukasi dan pendampingan yang diperlukan, serta mencegah mereka memperoleh akses pembiayaan atau meningkatkan kredibilitas usaha mereka (Hamongsina *et al.*, 2022; Rabianti & Heniwati, 2024). Di sisi lain, hambatan institusional seperti keterbatasan modal dan ketiadaan regulasi wajib juga memperlambat adopsi SAK EMKM. UMKM lebih memprioritaskan kebutuhan operasional daripada peningkatan kapasitas pencatatan (Krisdiyawati & Maulidah, 2023), dan tanpa adanya regulasi yang mewajibkan pelaporan keuangan berbasis SAK EMKM, penerapan standar ini menjadi sukarela dan bergantung pada kesadaran masing-masing pelaku usaha (Ekasari *et al.*, 2021). Namun demikian, berbagai peluang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memperkuat implementasi SAK EMKM. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan praktis dan pendampingan berkelanjutan, serta penyederhanaan panduan SAK EMKM yang dapat mempermudah pemahaman dan penerapannya (Cahyaningtias *et al.*, 2022; Fitriana, 2022). Selain itu, digitalisasi pembukuan berbasis aplikasi dapat menyederhanakan proses pencatatan keuangan dan memperbaiki persepsi bahwa SAK EMKM itu rumit dan tidak efisien (Imawan *et al.*, 2023; Tobing *et al.*, 2023). Peluang lain adalah memperkuat hubungan UMKM dengan lembaga eksternal, terutama perbankan, melalui pemberian insentif eksternal seperti menjadikan laporan SAK EMKM sebagai syarat untuk mengakses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan kolaborasi dengan koperasi serta komunitas usaha (Hamongsina *et al.*, 2022; Kurni *et al.*, 2023). Selain itu, ketiadaan regulasi wajib membuka ruang bagi pemerintah untuk menciptakan regulasi yang mendukung implementasi SAK EMKM tanpa membebani UMKM, seperti standarisasi pelaporan pada level desa atau kelurahan dan integrasi SAK EMKM dalam program bantuan pemerintah (Ekasari *et al.*, 2021; Ningsi *et al.*, 2024). Digitalisasi pembukuan berbasis aplikasi juga dapat menjadi solusi untuk mendukung penerapan SAK EMKM secara berkelanjutan (Saputri *et al.*, 2025; Utari *et al.*, 2022).

5. Kesimpulan

Penerapan SAK EMKM di Indonesia masih belum optimal. Hambatan utama berasal dari rendahnya literasi akuntansi pelaku UMKM, keterbatasan pendampingan dan SDM, persepsi bahwa SAK EMKM rumit dan kurang bermanfaat, serta minimnya dorongan institusional seperti akses pembiayaan dan regulasi pendukung. Namun demikian, terdapat peluang penguatan implementasi melalui peningkatan kapasitas akuntansi UMKM, pemanfaatan digitalisasi pembukuan, pendampingan berkelanjutan, kolaborasi lintas lembaga, serta pemberian insentif yang mengaitkan laporan keuangan berbasis SAK EMKM dengan akses pembiayaan dan program bantuan. Oleh karena itu, penerapan SAK EMKM memerlukan pendekatan terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan ekosistem dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

6. Referensi

- Cahyaningtias, L., Lamaya, F., & Windriati. (2022). Penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM) pada UMKM perikanan di Nusa Tenggara Timur (Studi kasus di UMKM Al-Ijtihad Kota Kupang). *Monex*, 11(1), 94–103. <https://doi.org/10.30591/monex.v11i01.3067>.
- Ekasari, L. D., Handayanto, A. J., & Sulistyowati, Y. (2021). Penerapan standar akuntansi keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Dupa Desa Dalisodo Kabupaten Malang Luh. *Jurnal Akuntansi*, 16(4), 679–686.

RESEARCH ARTICLE

- Emba, N. I., Tuli, H., & Muzdalifah. (2025). Identifikasi penerapan akuntansi berdasarkan SAK EMKM usaha mikro pada toko pakaian di Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku. *Jurnal Akuntansi*, 1.
- Feriyanto, O., & Nuryani, Y. (2024). Analisis kesiapan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah (SAK EMKM) (Studi kasus Pasar Segar Kopo Bandung). *Jurnal Manajemen dan Sumber Daya*, 9(204), 1806–1817. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.22989>.
- Fitriana, A. (2022). Implementasi pemahaman standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah bagi pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Sains Ekonomi*, 5(2), 199–207. <https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.159>.
- Hamongsina, K. D., Sumual, F. M., & Tala, O. Y. (2022). Analisis laporan keuangan UMKM berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah (Studi kasus pada Kapal Motor Sirene). *Jurnal Akuntansi*, 3(3), 376–386.
- Imawan, A., Mas'adah, N., Safitri, M., & Fadhil, A. F. (2023). Analisis penerapan akuntansi berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Dwi Laundry. *Jurnal Sumber Daya Bisnis*, 3(2), 247–261. <https://doi.org/10.30651/stb.v3i2.20865>.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering.
- Krisdiyawati, & Maulidah, H. (2023). Analisis implementasi akuntansi digital guna pencatatan keuangan pada UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi*, 6(1), 100–106. <https://doi.org/10.34128/jra.v6i1.174>.
- Kurni, A., Studi, P., Sekolah, M., Ilmu, T., Sukma, M., Studi, P., Perusahaan, M., Tinggi, S., Manajemen, I., & Medan, S. (2023). Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah (SAK EMKM) dan financial technology pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) keripik Barokah. *Equilibrium*, 12(2), 226–239. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1571>.
- Luchindawati, D. S., Nuraina, E., & Astuti, E. (2021). Analisis kesiapan UMKM batik di Kota Madiun dalam penerapan SAK EMKM. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 241–249.
- Mattoasi. (2023). Peningkatan pemahaman pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. *Mopolayio*, 2. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v2i3.69>.
- Nabila, R., & Khoiriawati, N. (2023). Analisis kesiapan UMKM batik Mugi Barokah untuk mengimplementasikan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah (SAK EMKM). *Jurnal Manajemen UMKM*, 7(1), 677–694.
- Ningsi, W., Kadafi, M., & Rahman, A. (2024). Analisis penerapan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) pada UMKM Ud Rezeki Ikan Laut. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 91–98.
- Rabianti, R., & Heniwati, E. (2024). Analisis penerapan akuntansi berdasarkan SAK EMKM pada UMKM bengkel motor. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 7(2). <https://doi.org/10.30596/jakk.v7i2.20040>.
- Saputri, A. E., Hidayatin, D. A., Prasetyo, H. B., Nash, H., & Purnomo, S. (2025). Penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK-EMKM) pada Pizza-Q di Desa

RESEARCH ARTICLE

Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. *Jurnal Manajemen Perekonomian*, 18(1). <https://doi.org/10.58431/jumpa.v18i1.313>.

Suwondo, S. (2021). Analisis penerapan penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. *Akunsika*, 2, 1–7. <https://doi.org/10.31963/akunsika.v2i1.2284>.

Tobing, L., Sartika, D., & Nofranita, W. (2023). Penerapan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. *Management Engineering*, 9(1), 47–58. <https://doi.org/10.31869/me.v9i1.4723>.

Tuli, H., & Mahmud, M. (2024). Pengungkapan perkembangan usaha mikro di Kecamatan Kabila Bone melalui tinjauan konsep entitas. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968307>.

Utari, R., Harahap, I., & Syahbudi, M. (2022). Penerapan SAK EMKM pada usaha mikro, kecil, dan menengah studi kasus UMKM di Kota Tanjungbalai. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 10(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1449>.